

Jurnal Ilmiah Manajemen

COOPETITION

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN IKOPIN

Vol. III. No. 1/ Maret/ Tahun 2012

ISSN : 2086-4620

Pengaruh Komitmen Profesional dan Komitmen
Organisasional Terhadap Kepuasan Kerja

Eka SetiaJatnika

Pengembangan Produk dengan Metode
Quality Function Deployment (QFD)

Deddy Supriyadi

Prospek Pendidikan Bisnis Keuangan Mikro di Indonesia
(Pendekatan Makro untuk Mikro Ekonomi)

Heri Nugraha

Perbedaan Komunikasi Edukasi di KUD dan di Kopontren
(Suatu Studi Pada KUD dan Kopontren di Jawa Barat)

Encep Supriatna



COOPETITION

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN IKOPIN

Vol. III, No. 1/ Maret/ Tahun 2012

ISSN : 2086-4620

DAFTAR ISI

PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT (Survei pada Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia)	
Oleh: Eka Setiajnika	1
PENGEMBANGAN PRODUK DENGAN METODE <i>QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)</i>	
Oleh: Deddy Supriyadi	30
PROSPEK PENDIDIKAN BISNIS KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA (Pendekatan Makro untuk Mikro Ekonomi)	
Oleh: Heri Nugraha	42
PERBEDAAN KOMUNIKASI EDUKASI DI KUD DAN DI KOPONTREN (Suatu Studi pada KUD dan Kopontren di Jawa Barat)	
Oleh: Wawan Lulus Setiawan	55
DESKRIPSI IKM PANGAN POTENSIAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING	
Oleh: Maman Suratman	69
PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN <i>DUPONT SYSYTEM</i>	
Oleh: Wahyudin	87
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA DAN KINERJA DOSEN TERHADAP PERILAKU BELAJAR MAHASISWA	
Oleh: Encep Supriatna	99

PROSPEK PENDIDIKAN BISNIS KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA (Pendekatan Makro untuk Mikro Ekonomi)

Oleh: Heri Nugraha *)

Abstrak

Memperhatikan indikator-indikator makro ekonomi seperti target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2012 di angka 6,6-6,7%, Kurs dollar AS diperkirakan sekitar Rp 8.758, BI rate hingga 6 %, dan inflasi sebesar 5,7 %, laju inflasi itu masih terbilang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mencerminkan penguatan daya beli masyarakat sejalan dengan laju pertumbuhan MI tahunan yang hingga Oktober 2011 mencapai 19,7 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan antar 2 s.d 4 \$ US per hari, dan jumlahnya adalah sebanyak 131 juta penduduk, ini merupakan potensi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

Sebagaimana layaknya sebuah bisnis keuangan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediary, maka sudah seharusnya ditunjang oleh lembaga-lembaga penjamin resiko seperti LPS (untuk simpanan) dan Asuransi (untuk kredit, dan semua itu dikhususkan untuk Keuangan Mikro yang melayani Usaha Mikro dan Kecil. Berkembangnya bisnis di sektor Keuangan Mikro, akan memerlukan pasokan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang, untuk itu IKOPIN diharapkan dapat berperan secara nyata dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan SDM handal yang diperlukan di sektor Keuangan Mikro. Tiga Pilar Utama dalam Bisnis Keuangan Mikro, adalah Tabungan Mikro (*mi-*

cro saving), Kredit Mikro (*micro credit*), dan Asuransi Mikro (*micro Insurance*).

Berdasarkan pada tiga pilar dalam bisnis Keuangan Mikro, maka kurikulum pendidikan harus diarahkan kepada tiga pilar tersebut. Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berbeda dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB), pada kelompok UMK unsur sosial dan budaya masih melekat sangat kuat sehingga dalam kurikulum pendekatan-pendekatan sosial dan budaya merupakan pelajaran dasar sebelum memahami pelajaran-pelajaran manajemen, teknis operasional dan teknologi. Sesuai dengan karakteristik UMK, maka Koperasi sebagai sebuah konsep ideologi, manajemen dan bisnis tentunya merupakan wadah dari kurikulum-kurikulum yang akan dikembangkan oleh IKOPIN.

Kata Kunci: Lembaga, Keuangan, Mikro

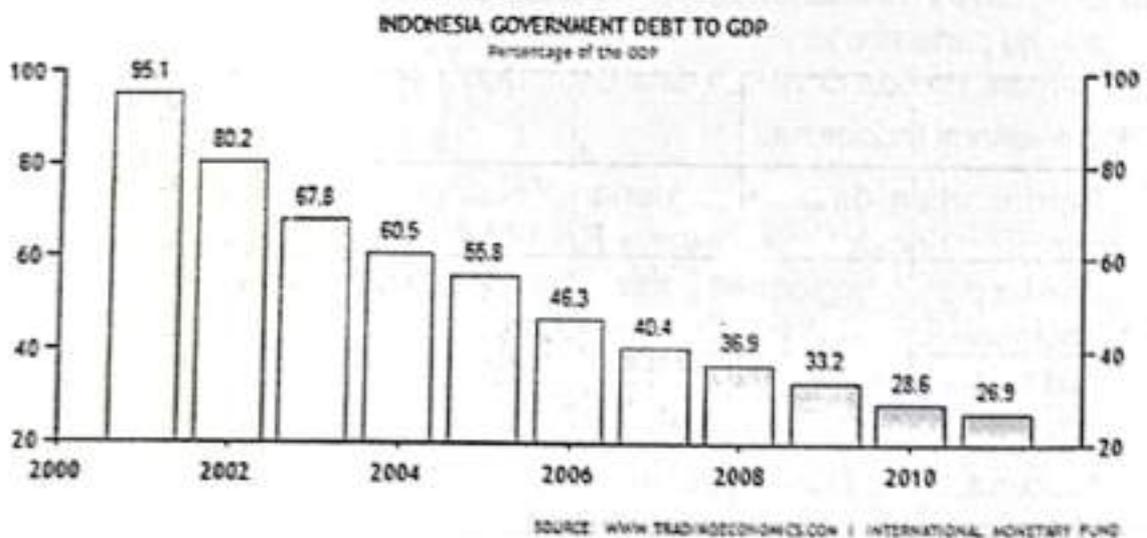
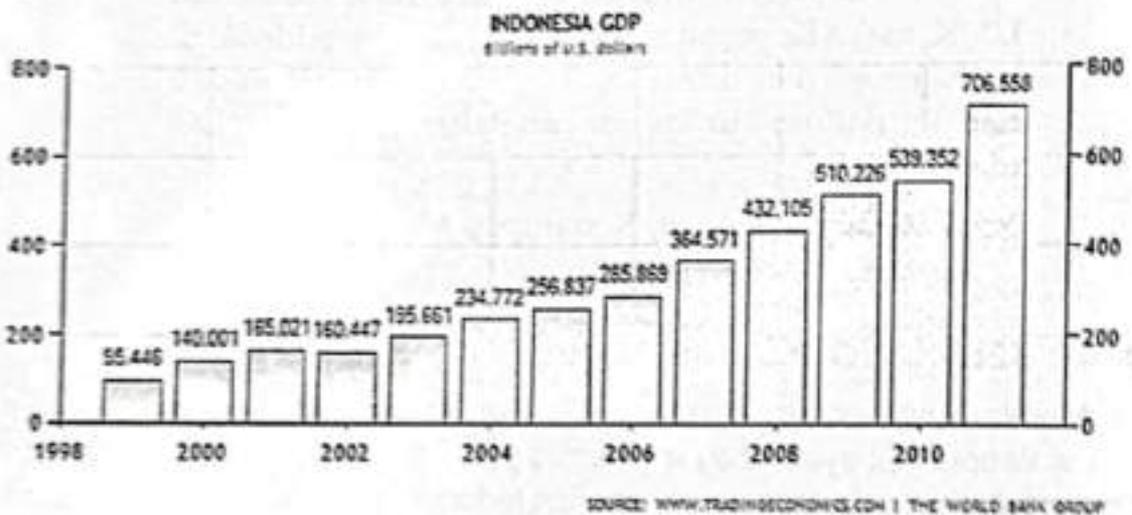
LATAR BELAKANG (KONDISI MAKRO EKONOMI)

Membaiknya perkembangan kondisi Perekonomian Indonesia di tahun 2011 walaupun dibayang-bayangi krisis perekonomian eropa, membuat pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia akan ekspansi di tahun 2012, hal ini ditunjukkan oleh indikator-indikator makro ekonomi seperti target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2012 di angka 6,6- 6,7%, Kurs dollar AS diperkirakan sekitar Rp 8.758, BI rate hingga 6 %, dan inflasi sebesar 5,7 %, laju inflasi itu masih terbilang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mencerminkan penguatan daya beli masyarakat sejalan dengan laju pertumbuhan M1 tahunan yang hingga Oktober 2011 mencapai 19,7 persen. Berikut disajikan data Bank Dunia untuk beberapa indikator makro ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam APBN 2012, pemerintah mengalokasikan dana Rp 161,4 triliun untuk membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan Rp55,6 triliun, infrastruktur permukiman Rp 33,4 triliun, infrastruktur irigasi Rp16,4 triliun, serta infrastruktur energi dan lainnya Rp 56,0 triliun.

Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia berpenghasilan rendah berkurang sekitar 7 juta orang per tahun dalam rentang waktu 2003-

2010, demikian salah satu catatan penting dalam Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia dari Bank Dunia yang dikeluarkan pada Maret 2011. Pada tahun 2003, mayoritas penduduk Indonesia berpenghasilan rendah dengan proporsi mencapai 62,2% dari seluruh penduduk Indonesia, sedangkan penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi mencapai 37,7% dan 0,1%. Namun pada 2010, proporsi penduduk berpenghasilan rendah turun drastis menjadi 43,3%, dan diikuti dengan kenaikan signifikan penduduk berpenghasilan menengah menjadi 56,5%; dan penduduk berpenghasilan tinggi sedikit bertambah menjadi 0,2%.

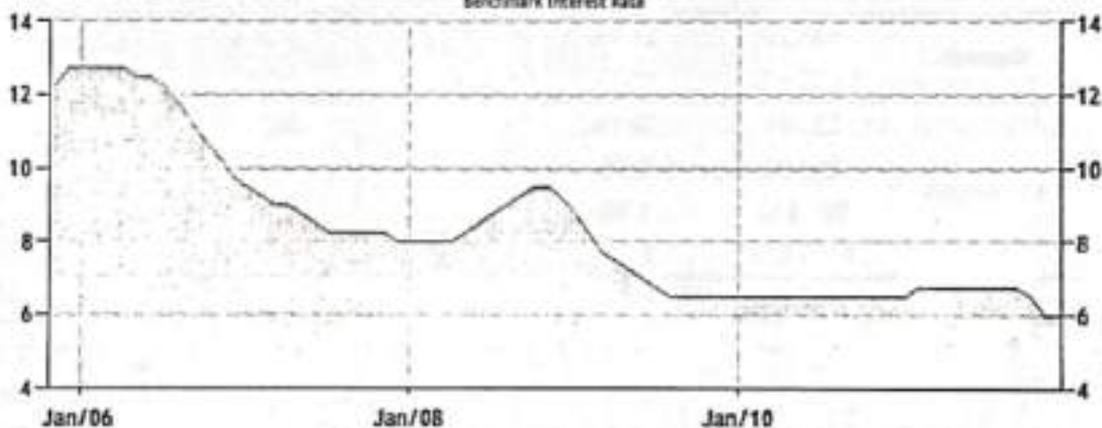


INDONESIA STOCK MARKET



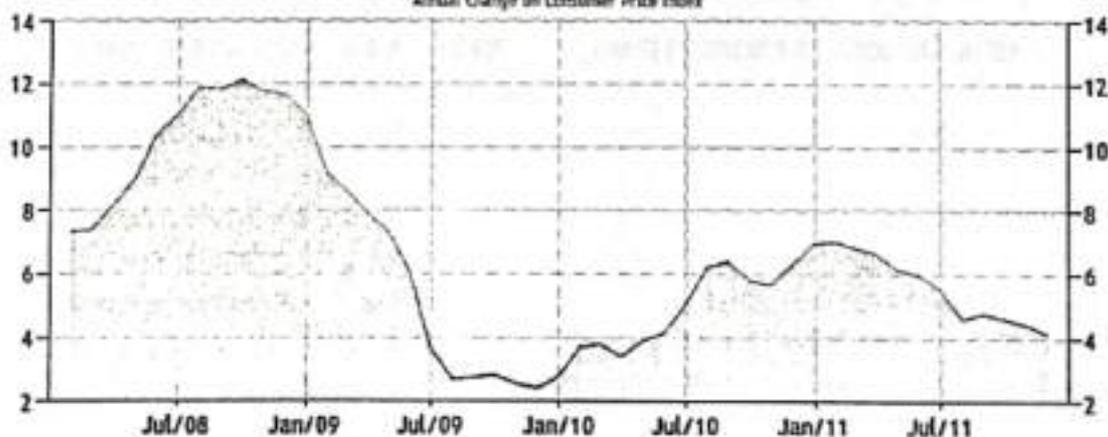
SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM

INDONESIA INTEREST RATE
Benchmark Interest Rate



SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | BANK INDONESIA

INDONESIA INFLATION RATE
Annual Change on Consumer Price Index



SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | BADAN PUSAT STATISTIK INDONESIA

Sumber: www.tradingeconomics.com Badan Pusat Statistik

Laporan triwulanan tersebut juga mencatat kenaikan jumlah penduduk Laporan triwulanan tersebut juga mencatat kenaikan jumlah penduduk berpenghasilan menengah dari sekitar 81 juta jiwa pada tahun 2003 (37,7%) menjadi 131 juta jiwa, (56,5%) pada tahun 2010. Berarti sekitar 50 juta penduduk Indonesia masuk ke dalam kelompok berpenghasilan menengah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Peningkatan kelompok ini terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Peningkatan penduduk berpenghasilan Menengah paling besar terjadi pada kelompok masyarakat dengan pendapatan 2 – 6 dollar Amerika. Sedangkan kelompok masyarakat dengan pendapatan 10 – 20 dollar Amerika merupakan kelompok dengan peningkatan terendah.

Kelas	Batas	2003		2010	
Rendah	< \$1,25	21,9%	62,2%	14,0%	43,3%
	\$1,25 – \$2	40,3%		29,3%	
Menengah	\$2 – \$4	32,1%	37,7%	38,5%	56,5%
	\$4 – \$6	3,9%		11,7%	
	\$6 – \$10	1,3%		5,0%	
	\$10 – \$20	0,3%		1,3%	
Tinggi	> \$20	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%

Sumber: Bank Dunia (<http://go.worldbank.org/9H1C9MBAW0>)

Berdasarkan statistik di atas, maka di tahun 2012 akan didominasi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah yang semakin banyak jumlahnya, dan ini memberikan peluang untuk penguatan bagi pasar domestik, beberapa ekonom menyatakan bahwa Indonesia memasuki era baru sebagai sebuah Negara yang cantik dan menawan yang akan menarik minat para investor. Namun, angka-angka di atas kertas tersebut tentunya harus juga sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada kenyataannya sebagian besar penduduk Indonesia terutama yang hidup di sektor-sektor *grass roots* seperti Perikanan, Pertanian, Perkebunan Rakyat, Sektor Informal dll, yang nota bene adalah UMKM (sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM), tetap saja mengalami permasalahan klasik dalam mengelola bisnis, yaitu akses pasar dan modal. Padahal sektor ini merupakan penopang utama struktur perekonomian Indonesia, sehingga sebagai sebuah pondasi sektor ini harus yang terkuat dibanding sektor lainnya. Merujuk pada data dari Bank dunia maka yang di maksud sebagai penduduk yang berada di *grass roots* adalah mereka

yang berada di kelas pendapatan rendah sebanyak 43,3%, dan sebagian di kelas pendapatan menengah yang berbatasan langsung dengan kelas rendah sebanyak 38,5%, jika dijumlahkan total sebesar 81,8% dari seluruh penduduk Indonesia, ternyata jumlahnya sangat besar dan merekalah yang harus dijadikan sebagai subjek utama bagi pembangunan perekonomian.

Seperti telah disebutkan di atas, karakteristik UMKM salah satunya adalah akses ke lembaga pembiayaan terutama Bank, karena biasanya usaha-usaha di sektor ini belum *bankable*, resiko tinggi, fluktuasi harga tinggi dan lain-lain, sehingga sektor ini kurang diminati oleh perbankan. Untuk itu maka diperlukan suatu lembaga pembiayaan yang dapat menyediakan jasa-jasa keuangan kepada sektor ini, dan yang paling tepat adalah Lembaga Keuangan Mikro (*micro finance*), seperti: Perbankan mikro, BPR, KSP/USP, BMT, BKD, LDKP dan Asuransi Mikro.

METODE ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang kemudian di analisis secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang berkembang dan terjadi di masyarakat mengacu kepada teori-teori ekonomi baik makro maupun mikro.

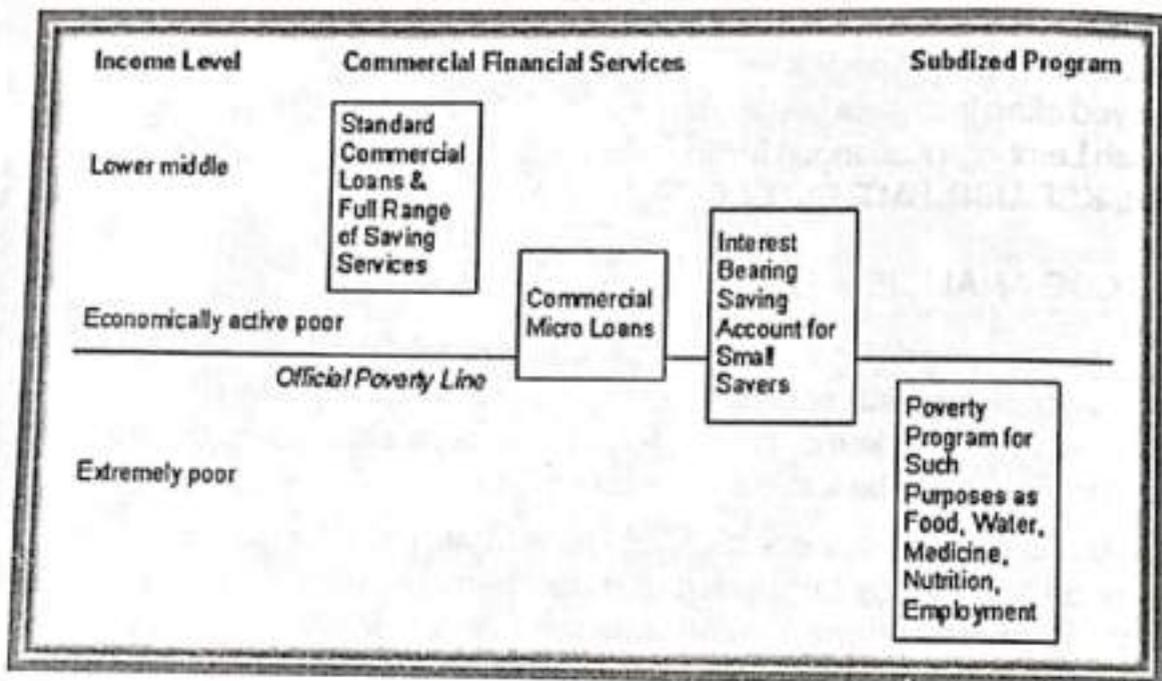
Analisis makro ekonomi merujuk kepada data indikator ekonomi makro berdasarkan kepada target-target acuan pemerintah dalam menyusun program pembangunan ekonomi, yang merupakan patokan bagi penyusunan strategi di tingkat mikro ekonomi, sedangkan pembahasan di bidang mikro ekonomi merujuk langsung kepada teori-teori keuangan mikro berikut dengan fenomena-fenomena yang berkembang dimasyarakat.

SELINTAS TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (KONDISI MIKRO EKONOMI)

Menurut Marguiret Robinson (2000), pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk di dalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan

lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.



Gambar

Financial Services in the Poverty Alleviation Toolbox (Marguiret, 2000)

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

Berdasarkan hasil survey Wilijo Wiro Wijino (2005), menunjukkan bahwa UMKM memanfaatkan sumber permodalan berasal dari :

1. Koperasi (KSP/USP) sebanyak 20%
2. Perorangan sebanyak 21%
3. Keluarga 17%

4. Lembaga Keuangan Non Bank	10%
5. Bank	6%
6. Lain-lain	26%

Sedangkan jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik yang berbentuk Koperasi dan bukan Koperasi (LKM B3K) berdasarkan data dari Kementerian KUMKM tahun 2010, adalah sebanyak 637.888 unit, jumlah ini tentu saja sangat timpang jika dibanding dengan jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang memerlukan permodalan yang jumlahnya kurang lebih 52,7 juta usaha Mikro dan Kecil, atau jika merujuk pada data Bank Dunia (2010) adalah sebanyak 131 orang penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa *Supply* Keuangan mikro masih sangat kecil jika dibandingkan dengan *Demand* untuk bidang ini.

PERAN KLASIK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Secara klasik, sebagai *intermediary institutiun*, lembaga keuangan menjalankan kegiatannya dalam bentuk penghimpunan dana dari pihak yang mengalami surplus dana melalui produk *saving*, dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang mengalami defisit dana melalui produk *lending*.

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Menurut "Gema PKM" (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia), Strategi pengembangan keuangan mikro mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan, termasuk melakukan penguatan lembaga-lembaga pendampingan terutama yang berfungsi menghubungkan sector formal dan non-formal.
2. Memadukan pendekatan kelompok dan individual sesuai dengan kebutuhan dan penerimaan masyarakat.
3. Mengembangkan keterpaduan antara penyaluran pinjaman dan mobilisasi tabungan masyarakat, sekaligus menjadikan tabungan sebagai basis system dan kekuatan keuangan mikro.
4. Membangun kapasitas lembaga keuangan mikro, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKM, dan instansi

pemerintah; terutama dalam hal peningkatan kemampuan sumberdaya manusia; system dan prosedur operasi, teknologi, terutama teknologi informasi; jaringan kerjasama; dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

5. Menegaskan kembali sekaligus memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap arti peranan perempuan dalam setiap usaha pengembangan keuangan mikro.
6. Mengembangkan lembaga-lembaga penunjang keuangan mikro sebagai berikut:
 - a. Lembaga yang dapat berfungsi sebagai sumber permodalan bagi lembaga keuangan mikro (*secondary source of fund*), baik melalui pengembangan keterkaitan (*linkage*) dengan bank dan lembaga keuangan yang sudah ada maupun melalui pengembangan lembaga pendanaan (*wholesaler of fund, polling of fund*) khusus untuk keuangan mikro.
 - b. Lembaga yang dapat menjalankan fungsi perlindungan atas simpanan dan pinjaman
 - c. Lembaga pengawasan, yang sekaligus melakukan standarisasi minimal terhadap praktik keuangan mikro, supervisi, audit, rating, dan sertifikasi lembaga keuangan mikro.
 - d. Lembaga yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengembangan keuangan mikro, mulai dari sosialisasi peran dan fungsi KM, pengembangan SDM, pengembangan system dan prosedur, pengembangan teknologi, dan pengembangan data-base keuangan mikro Indonesia; serta
 - e. Lembaga yang membangun jaringan kerjasama (*network*) antar LKM.
7. Perlu dipikirkan untuk dipertimbangkan dibentuknya semacam lembaga "bank sentral alternatif bagi LKM" yang dibentuk oleh pemerintah, Bank Indonesia dan (asosiasi) LKM.
8. Mewujudkan komitmen perbankan dalam pengembangan keuangan mikro, khususnya dengan memastikan alokasi dana dalam '*business-plan*' perbankan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro yang memiliki integritas dan kapabilitas teruji. Dalam hal ini perlu dikembangkan strategi Hubungan Bank dan Lembaga Keuangan Mikro (HBL) sebagai pengembangan dari strategi Hubungan Bank dan Kelompok (HBK).

9. Mengembangkan dan menguatkan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional baik dalam bidang keuangan, bantuan teknis bagi pembangunan kapasitas, maupun dalam pengembangan jaringan kerjasama dan hubungan dengan pihak-pihak lainnya.
10. Mengembangkan dan menguatkan kerjasama dengan dunia usaha terutama dalam bentuk pengembangan kerjasama bisnis, 'sharing' kompetensi, 'sharing' jaringan kerjasama, dan 'sharing' modal.

Dalam mengembangkan keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin (*economically active poor*) tersebut, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan :

1. *Banking of the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas *membership base* dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama, *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan lain-lain.

2. *Banking with the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang *nature*-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar semangat simbiose mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (*outreaching*), sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan *financial support*. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Dalam PHBK ini terdapat 3 model, yaitu :

a) Model Hubungan 1

Bank melakukan pelayanan keuangan langsung pada kelompok dan LPUM (Lembaga Pendampingan Usaha Mikro) berperan sebagai mitra bank untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada kelompok. Bank memberikan fee biaya pembinaan yang diperhitungkan dalam tingkat bunga kredit. Akad kredit dilakukan antara bank dengan Ketua atau Pengurus Kelompok yang memperoleh kesepakatan dari para anggotanya.

b) Model Hubungan 2

Bank memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok melalui LPUM. Pelayanan keuangan dan pembinaan kelompok dilakukan oleh LPUM. Biaya kegiatan pendampingan diperoleh dari selisih bunga kredit dari bank dengan yang dibayar oleh kelompok.

c) Model Hubungan 3

Bank mengidentifikasi sendiri kelompok yang telah ada, atau memfasilitasi proses pembentukan kelompok diantara pengusaha mikro potensial yang sudah terseleksi, memberikan pelayanan keuangan dan sekaligus membina kelompok-kelompok tersebut sebagai nasabahnya.

3. Banking for the poor

Bentuk ini mendasarkan diri atas *credit led institution* dimana sumber dari *financial support* terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, ASA, dan lain-lain.

Bentuk pertama (*Banking of the poor*) menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian. Bentuk ketiga (*Banking for the poor*) menekankan pada penggalangan *resources* yang dijadikan modal (*capital heavy*), yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Sedangkan bentuk kedua (*Banking with the poor*) lebih menekankan pada fungsi penghubung (*intermediary*) dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada.

PROSPEK PENDIDIKAN BISNIS KEUANGAN MIKRO

Berkembangnya perekonomian Indonesia seperti yang diuraikan dalam Latar Belakang, mendorong meningkatnya daya beli dan menggairahkan dunia usaha termasuk sektor Perikanan dan Pertanian, namun agar perkembangan di sektor ini dapat sejalan dengan sektor lainnya, maka keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (*micro finance*) akan sangat diperlukan. Hal ini merujuk pada fakta bahwa *Supply* lebih kecil dari pada *Demand* pada Bisnis Keuangan Mikro.

Saat ini kebutuhan terhadap Lembaga Keuangan Mikro sudah sedemikian mendesak, namun ternyata SDM yang kompeten untuk bidang ini masih langka, sehingga hal ini merupakan kesempatan bagi Lembaga Perguruan Tinggi IKOPIN untuk menyiapkan kurikulum untuk Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan di IKOPIN, dan sebanyak 131 juta penduduk produktif di Indonesia atau sebanyak 52,7 Usaha Mikro dan Kecil, adalah potensi pasar bagi bisnis Lembaga Keuangan Mikro.

Tiga pilar utama dalam Bisnis Keuangan Mikro, adalah :

1. Tabungan Mikro (*micro saving*)
2. Kredit Mikro (*micro credit*)
3. Asuransi Mikro (*micro Insurance*)

Berdasarkan pada tiga pilar dalam bisnis Keuangan Mikro, maka kurikulum pendidikan harus diarahkan kepada tiga pilar tersebut.

Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berbeda dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB), pada kelompok UMK unsur sosial dan budaya masih melekat sangat kuat sehingga dalam kurikulum pendekatan-pendekatan sosial dan budaya merupakan pelajaran dasar sebelum memahami pelajaran-pelajaran manajemen, teknis operasional dan teknologi.

Sesuai dengan karakteristik UMK, maka Koperasi sebagai sebuah konsep ideologi, manajemen dan bisnis tentunya merupakan wadah dari kurikulum-kurikulum yang akan dikembangkan oleh IKOPIN.

KESIMPULAN

1. Potensi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia sangat besar yakni sekitar 131 juta penduduk yang berpenghasilan antar 2 s.d. 4 \$ US per hari. Hal ini merupakan potensi yang besar bagi berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro

2. Sebagaimana layaknya sebuah bisnis keuangan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediary, maka sudah seharusnya ditunjang oleh lembaga-lembaga penjamin resiko seperti LPS (untuk simpanan) dan Asuransi (untuk kredit, dan semua itu dikhususkan untuk Keuangan Mikro yang melayani Usaha Mikro dan Kecil.
3. Berkembangnya bisnis di sektor Keuangan Mikro, akan memerlukan pasokan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompetren di bidang, untuk itu IKOPIN diharapkan dapat berperan secara nyata dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan SDM handal yang diperlukan di sektor Keuangan Mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Ismawan. *Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003.*
Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah
- Robinson, Marguirete, *The Micro Finance Revolution, Sustainable Finance for the Poor, The World Bank, 2000*
- Rudjito. *Jurnal Ekonomi Rakyat. TH II. No.1. Maret 2003..* Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan.
- Wiljo Wiro Wijino. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisis Khusus November 2005,* Pengembangan Keuangan Mikro untuk Pengentasan Kemiskinan
<http://go.worldbank.org/9H1C9MBAW0>

*) **Dr. Heri Nugraha, SE, MSi.** adalah doktor bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, dosen tetap Ikopin, advisor KUMKM PT Bank Saudara, Tbk.

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Prospek Pendidikan Bisnis, Keuangan Mikro di Indonesia. (Pendekatan Makro untuk Mikro Ekonomi)

Penulis Jurnal Ilmiah : HERI NUGRAHA2)

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : COOPERATION3)
 b. Nomor/Volume : 1/ III3)
 c. Edisi (bulan/tahun) : MARET 20123)
 d. Penerbit : MM IKOPIN3)
 e. Jumlah halaman : 1203)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional4)
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 6)			Nilai Yang Diperoleh 7)
	Internasional 40	Nasional Terakreditasi 25	Nasional Tidak Terakreditasi 10	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4	2,5	1	0,70
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	7,5	3	2,40
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	7,5	3	2,25
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12	7,5	3	2,35
Total = (100%)	40	25	10	7,70

Jatinangor, 21 Maret 20148)

Reviewer 1

tanda tangan9)
Prof. Dr. H. Buchan Rajef, L
 NIP 01807829)
 Unit kerja : Guru Besar9)

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Prospek Pendidikan Bisnis, Keuangan Mikro di Indonesia (Peningkatan Makro untuk Mikro ekonomi)

Penulis Jurnal Ilmiah : HERI NUGRAHA 2)

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : COOPERATION 3)
 b. Nomor/Volume : 1/ III 3)
 c. Edisi (bulan/tahun) : MARET, 2012 3)
 d. Penerbit : MM IKOPIN 3)
 e. Jumlah halaman : 120 3)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional4)
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 6)			Nilai Yang Diperoleh 7)
	Internasional 40	Nasional Terakreditasi 25	Nasional Tidak Terakreditasi 10	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4	2,5	1	0,80
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	7,5	3	2,70
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	7,5	3	2,80
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12	7,5	3	2,75
Total = (100%)	40	25	10	9,05

Jatinangor, 20 Maret 2012 8)

Reviewer 2

tanda tangan9)

Dr. H. Fay Supriyadi S., Ir., MT 9)

NIP. 2910599 9)

Unit kerja : Prodi SI 9)

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Prospek Pendidikan Bisnis, Keuangan Mikro di Indonesia
 (Pendekatan Makro untuk Mikro ekonomi)

Penulis Jurnal Ilmiah : HERI NUGRATA 2)

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : COOPETITION 3)
 b. Nomor/Volume : 1/2 II 3)
 c. Edisi (bulan/tahun) : MARET 2012 3)
 d. Penerbit : MAI IKOPIN 3)
 e. Jumlah halaman : 120 3)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional4)
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Reviewer..... 6)		Nilai Rata- rata 7)
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	0,70	0,80	0,75
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	2,40	2,70	2,55
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	2,25	2,80	2,53
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	2,35	2,75	2,55
Total = (100%)	7,70	9,05	8,38

Jatinyan, 2 Maret 2014 8)

Reviewer 2

Tanda tangan10)

.....10)

NIP 241059410)

Unit kerja :10)

Reviewer 1

tanda tangan9)

.....9)

NIP9)

Unit kerja :9)

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

- Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Prospek Pendidikan Bisnis, Keuangan Mikro di Indonesia (Pendekatan Makro untuk Mikro Ekonomi)
- Penulis Jurnal Ilmiah : HERI NUERHA
- Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : COOPETITION
 b. Nomor/Volume : J/III
 c. Edisi (bulan/tahun) : MARET 2012
 d. Penerbit : MM KOPIN
 e. Jumlah halaman : 120
- Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional4)
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 6)			Nilai Akhir Yang Diperoleh7)
	Internasional 40	Nasional Terakreditasi 25	Nasional Tidak Terakreditasi 10	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4	2,5	1	0,75
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	7,5	3	2,55
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	7,5	3	2,53
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12	7,5	3	2,55
Total = (100%)	40	25	10	8,38

Reviewer 2

Tanda tangan10)
Dr. H. Fay Supriyadi, Ir., MT
 NIP 2410519410)
 Unit kerja : Prodi SI10)

Reviewer 1

Jatiningga, 21 Maret 20128)
 Tanda tangan9)
Prof. Dr. H. Nuera Nuerha, Ir.
 NIP 01807829)
 Unit kerja : Guru Besar9)